



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



PERJANJIAN KINERJA

PEMUTAKHIRAN I

INSPEKTORAT JENDERAL TA.2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal

Yasonna H. Laoly

Razilu
NIP 196511281991031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR JENDERAL DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SP WA.5 Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi terkait Pengawasan Intern Pemerintah	ISP WA 5.1 Nilai Aspek Evaluasi AKIP Internal Kemenkumham	20
		ISP WA 5.2 Nilai Komponen Struktur dan Proses pada Maturitas Penyelenggaraan SPIP	0,802
		ISP WA 5.3 Indeks Manajemen Risiko	3,00
		ISP WA 5.4 Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,00
		ISP WA 5.5 Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,10

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen		Rp. 64.267.692.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 4.005.295.000,-
2.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 4.005.295.000,-
3.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 4.005.295.000,-
4.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 4.005.295.000,-
5.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 4.005.295.000,-
6.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 5.005.295.000,-
7.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 39.235.922.000,-

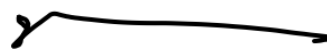
Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 719.573.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal



Yasonna H. Laoly

Razilu
NIP 196511281991031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SP WA.5 SK 1569.1 Meningkatnya Kapabilitas APIP Kemenkumham	ISK 1569.1.1 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM	85%
2.	SP WA.4 SK 1569.2 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	ISK 1569.2.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	100%
		ISK 1569.2.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1

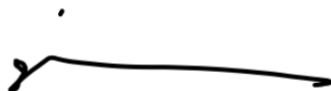
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 39.235.922.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 39.235.922.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 104.573.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal



Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Plh. Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yusanti
Jabatan : Inspektur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu

NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I

Ika Yusanti

NIP 197112071993032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH I DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Sasaran Kegiatan (3)	Target (4)
1.	SP WA.5 SK 1563 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah I	ISK 1563.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah I	90%
		ISK 1563.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah I	90%
		ISK 1563.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah I	90%
		ISK 1563.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah I	90%

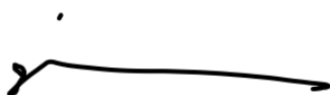
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Rp. 4.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah I



Ika Yusanti
NIP 197112071993032002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ika Yusanti
Jabatan : Inspektur Wilayah I

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Wilayah I

Ika Yusanti
NIP 197112071993032002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH II DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	SP WA.5 SK 1564 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah II	ISK 1564.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah II	90%
		ISK 1564.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah II	90%
		ISK 1564.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah II	90%
		ISK 1564.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah II	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Rp. 4.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah II



Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Sujandi
Jabatan : Inspektur Wilayah II

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Wilayah II

Lilik Sujandi
NIP 197110171995031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III

Iwan Santoso
NIP 197004301991031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH III DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	SP WA.5 SK 1565 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah III	ISK 1565.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah III	90%
		ISK 1565.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah III	90%
		ISK 1565.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah III	90%
		ISK 1565.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah III	90%

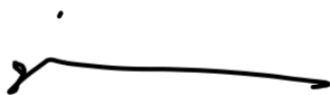
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	Rp. 4.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah III



Iwan Santoso
NIP 197004301991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Santoso
Jabatan : Inspektur Wilayah III

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Wilayah III

Iwan Santoso
NIP 197004301991031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH IV DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	SP WA.5 SK 1566 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah IV	ISK 1566.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah IV	90%
		ISK 1566.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah IV	90%
		ISK 1566.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah IV	90%
		ISK 1566.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah IV	90%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	Rp. 4.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah IV



Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Setyabudi
Jabatan : Inspektur Wilayah IV

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Januari 2024

Inspektur Wilayah IV

Bambang Setyabudi
NIP 196911281997031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa
Jabatan : Inspektur Wilayah V

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V

Pria Wibawa
NIP 196507281988031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH V DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SP WA.5 SK 1567 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah V	ISK 1567.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah V	90%
		ISK 1567.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah V	90%
		ISK 1567.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah V	90%
		ISK 1567.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah V	90%

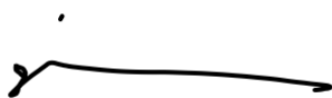
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	Rp. 4.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah V



Pria Wibawa
NIP 196507281988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pria Wibawa
Jabatan : Inspektur Wilayah V

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Wilayah V

Pria Wibawa

NIP 196507281988031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH VI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Yuliani
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal

Razilu

NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI

Sri Yuliani

NIP 196907221998032001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR WILAYAH VI DENGAN INSPEKTUR JENDERAL**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	SP WA.5 SK 1568 Terwujudnya Penyelenggaraan SPIP dan Evaluasi Internal AKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sesuai Kewenangan Inspektorat Wilayah VI	ISK 1568.1 Persentase tindak lanjut Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait evaluasi AKIP internal Kemenkumham sesuai kewenangan Inspektorat Wilayah VI	90%
		ISK 1568.2 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP untuk komponen struktur dan proses pada Inspektorat Wilayah VI	90%
		ISK 1568.3 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait manajemen risiko di Inspektorat Wilayah VI	90%
		ISK 1568.4 Persentase tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP terkait efektifitas pengendalian korupsi pada Inspektorat Wilayah VI	90%

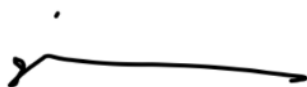
No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.005.295.000,-
1.	Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	Rp. 5.005.295.000,-

Sumber data : DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 *Digital Stamp* Nomor DS: 9744-0908-4356-6436

- Berdasarkan Nota Dinas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-PR.01.04-01 tanggal 9 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* atas saldo anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp 102.500.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Pihak Kedua,
Inspektur Jenderal



Razilu
NIP 196511281991031002

Pihak Pertama,
Inspektur Wilayah VI



Sri Yuliani
NIP 196907221998032001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 INSPEKTUR WILAYAH VI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Yuliani
Jabatan : Inspektur Wilayah VI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 15 Februari 2024

Inspektur Wilayah VI

Sri Yuliani
NIP 196907221998032001